

From Regulation to Realization: Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website Pemerintah Desa

Muhammad Fahreza Bahtiar¹, Nabilah Atika Sari², Muhammad Faqih Annshori³

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret*
email: muhammadfarezabahtiar@gmail.com , werk.atika@gmail.com , mfaqihannshori@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memberikan perspektif analisis mengenai implementasi pengembangan website Desa sebagai instrumen keterbukaan informasi bagi masyarakat. Pendekatan yang peneliti gunakan yakni kualitatif deskriptif dengan proses teknis wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni model interaktif dari Miles & Huberman serta kerangka implementasi kebijakan George Edward III dengan cakupan dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa meskipun website Desa Sukonolo telah dibangun dengan dukungan Program KKN FIA Universitas Brawijaya dan regulasi nasional tentang keterbukaan informasi publik, tetapi implementasinya belum berjalan optimal. Komunikasi kebijakan yang terjadi masih terbatas pada level internal perangkat desa, sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi masih tergolong minim, disposisi perangkat desa masih terkendala oleh hambatan dukungan kapasitas teknis memadai, serta belum tersedianya Standar Operasional Prosedur yang khusus meregulasi pengelolaan website pemerintah Desa Sukonolo. Faktor pendukung yakni komitmen aparatur desa dan dukungan regulasi eksternal dari pemerintah Kabupaten, namun masih terdapat hambatan utama yakni keterbatasan kompetensi teknis, infrastruktur, serta kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi berupa penguatan kapasitas SDM, penyediaan fasilitas teknologi, penyusunan SOP, serta peningkatan sosialisasi agar website desa dapat digunakan secara efektif sebagai sarana transparansi dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Website Desa, Keterbukaan Informasi Publik, Implementasi Kebijakan.

Abstract

This study provides an analytical perspective on the implementation of village website development as an instrument of information disclosure for the public. The approach used by the researcher is descriptive qualitative with technical processes of in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis used is the interactive model from Miles & Huberman and the policy implementation framework from George Edward III dimensions of communication, resources, implementer disposition, and organizational structure. The results of the study illustrate that although the Sukonolo Village website has been developed with the support of the FIA Universitas Brawijaya KKN Program and national regulations on public information disclosure, its implementation has not been optimal. Policy communication that occurs is still limited to the internal level of village officials, human resources and technological infrastructure are still relatively minimal, the disposition of village officials is still hampered by obstacles to adequate technical capacity support, and the absence of Standard Operating Procedures specifically regulating the management of the Sukonolo Village government website. Supporting factors, namely the commitment of village officials and external regulatory support from the Regency government, but there are major obstacles, limited technical competence, infrastructure, and institutions. Therefore, this study provides recommendations for strengthening human resource capacity,

providing technological facilities, developing standard operating procedures (SOPs), and increasing outreach to ensure the effective use of village websites as a means of transparency and public participation.

Keywords: Village Website, Public Information Disclosure, Policy Implementation.

Pendahuluan

Era globalisasi membawa perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat berkembang, terutama dalam kaitannya dengan tata hubungan internasional (Hakim, 2016). Perubahan ini berdampak ganda, yakni bermakna positif berupa percepatan arus teknologi dan informasi serta bermakna negatif berupa potensi merosotnya value social & value culture. Salah satu bentuk dari kemajuan yang terjadi saat ini yakni pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya tata kelola sistem berbasis elektronik, yang memberikan dampak besar pada *good governance* (Rohman, 2020).

Negara dalam hal ini regulasi yang ditetapkan di Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar (Rohman, 2020). Namun, pada faktanya masih ditemukan maladministrasi yang menghambat kualitas pelayanan publik. Data Ombudsman RI (2022) menunjukkan adanya 2.706 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi hanya dalam Triwulan tahun 2022, dengan mayoritas berupa laporan langsung dari masyarakat (Ombudsman RI, 2022). Kondisi tersebut menegaskan bahwa betapa pentingnya unsur keterbukaan informasi kepada publik. Selaras dengan dijaminnya keterbukaan informasi publik ini di dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945, yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan individu sebagai pribadi serta lingkungan sosialnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, website desa menjadi instrumen strategis untuk memenuhi hak informasi publik sekaligus menjadi perantara untuk mengoptimalkan prinsip *good governance* (Febriananingsih, 2012).

Namun, implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa seringkali terdapat hambatan. Desa Sukonolo, kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang misalnya sebagai lokus dalam penelitian ini masih terdapat problematika pemanfaatan informasi oleh masyarakat. Seperti halnya keterbatasan akses internet, kurangnya keterampilan dari teknis aparatur desa serta isu keamanan data menjadi faktor penghambat. Kondisi tersebut kemudian ditanggapi oleh mahasiswa KKN FIA UB yang berusaha untuk mendorong perluasan akses masyarakat terhadap informasi publik (Dokumentasi Pemdes Sukonolo, 2023).

Gambar 1.
Mapping Riset Terdahulu

| Peneliti & Tahun | Judul | Metode | Fokus Kajian | Temuan Utama | Kesenjangan /Gap Research |
|--|---|-------------------------------|---|---|--|
|  Rahimi dkk. (2017) | Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk Menuju Tata Kelola Desa yang Baik (Good Governance) Berbasis TIK | Kualitatif - SDLC | Pengembangan SID berbasis teknologi informasi | SID meningkatkan kualitas pelayanan, produktivitas, dan akuntabilitas | Belum membahas faktor implementasi kebijakan secara mendalam |
|  Supiyandi dkk. (2023) | Penerapan Spiral Method dalam Pengembangan Sistem Informasi Desa sebagai Keterbukaan Informasi Publik | Kualitatif - Spiral Model | Pengembangan sistem informasi desa berbasis web | Mempermudah perangkat desa dalam pengolahan data dan penyebaran informasi | Fokus pada metode pengembangan, belum mengulas hambatan sosial dan birokrasi |
|  Nesthy Kheren Nadia dkk. (2022) | Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi pada Website PPID Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko) | Kualitatif - Content Analysis | Analisis konten website PPID Desa | Aparatur desa berkomitmen dalam keterbukaan informasi, transparansi meningkat | Tidak membahas aspek sumber daya dan struktur birokrasi |
|  Patmasari & Suharno (2019) | Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sieman | Kualitatif - Deskriptif | Implementasi keterbukaan informasi publik desa | Implementasi KIP belum optimal; hambatan berupa kurangnya sosialisasi & PPID | Belum menyentuh aspek teknologi website secara khusus |

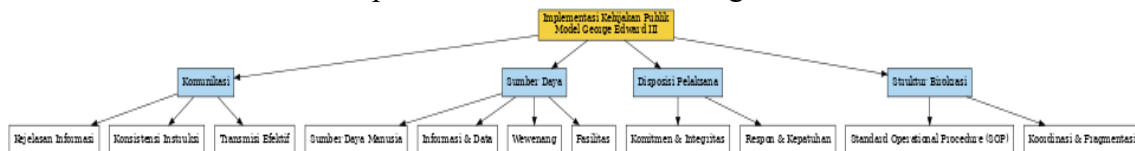
Sumber: Penulis, 2025

Dalam kajian teoritis bahwa keterbukaan informasi publik merupakan ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat (Setiaman, Sugiana, & Mahameru Aji, 2013). Sebagaimana merujuk pada Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa kewajiban badan publik untuk memberikan informasi yang transparan, lengkap, dan jelas kepada masyarakat. Sehingga tujuan utamanya yakni memberikan peningkatan berupa partisipasi publik dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan (Retnowati, 2012). Lebih dalam, perspektif administrasi publik memberikan pandangan bahwa keberhasilan penyelenggaraan keterbukaan informasi sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip *good governance*, yaitu, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat (Mindarti, 2016). Sebagai disiplin ilmu yang bersifat dinamis, administrasi publik terus berkembang seiring perubahan paradigma dari Old Public Administration (OPA) menuju paradigma New Public Service (NPS) menekankan urgensi partisipasi warga negara lebih dari sekedar konsumen layanan, tetapi aktor aktif dalam proses tata kelola pemerintahan.

Konteks kebijakan publik memberikan ruang spesifik dari administrasi publik yakni menurut Islamy (2014) mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan pemerintah yang ditetapkan dalam hal pemenuhan kepentingan masyarakat. Suharto (2015) menambahkan bahwa kebijakan publik merupakan respon konkret dari kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai instrumen negara dalam menyelesaikan masalah sosial. Grindle (dalam Subarsono, 2005) memberikan argumentasi bahwa isi kebijakan publik dalam hal ini konteks implementasi dapat memengaruhi pencapaian program yang

ditetapkan. Model Edward III merupakan salah satu kerangka yang relevan terhadap kajian eksistensi implementasi kebijakan, dimana terdapat empat faktor utama: komunikasi, sumberdaya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi (Nugroho, 2009; Winarno, 2016). Komunikasi harus jelas, konsisten, dan dapat dipahami pelaksana. Sumber daya, baik staf, informasi, wewenang, maupun fasilitas, menjadi elemen vital. Sikap atau disposisi implementor menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Sementara struktur birokrasi, melalui Standard Operational Procedure (SOP) dan koordinasi antar bidang, berperan penting dalam menjaga efektivitas implementasi. Website desa, sebagai wujud implementasi kebijakan sistem informasi publik, memungkinkan untuk dilakukan penyebaran data kebijakan, anggaran, maupun program pembangunan desa secara luas, sehingga mampu memperkuat keterlibatan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan.

Gambar 2.
Adopsi Framework Model George Edward III



Sumber: Penulis, 2025

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan alam kajian implementasi kebijakan publik dengan fokus pada pengembangan website Pemerintah Desa Sukonolo. Terdapat perbedaan dengan riset terdahulu yang pada umumnya membahas sistem informasi secara umum (Rahimi, dkk., 2017; Supiyandi dkk., 2023; Nesthy Kheren Nadia dkk., 2022). Adapun uraian dari penelitian dirumuskan guan menjawab pertanyaan Bagaimana dan apa saja faktor pendukung maupun penghambat dari implementasi kebijakan pengembangan website Pemerintah Desa Sukonolo. Sehingga Penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis implementasi kebijakan yang eksisting berdasarkan model Edward III dengan cakupan dimensi antara lain, komunikasi, sumberdaya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan demikian, penelitian ini akan diperoleh hasil deskripsi yang terbaru serta memberikan keterkaitan antara kajian teoritis, empiris dan masalah implementasi kebijakan guna memberikan optimalisasi terhadap informasi publik di Desa Sukonolo.

Metode

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis implementasi pengembangan sistem website pemerintah desa Sukonolo secara mendalam berdasarkan fakta empiris di lapangan (Sugiyono, 2018). Fokus penelitian diarahkan pada proses implementasi dari kebijakan pengembangan sistem website desa sebagai instrumen keterbukaan informasi publik, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dengan menggunakan kerangka analisis model Edward III (Nugroho, 2009; Winarno, 2016). Adapun pemilihan lokasi penelitian adalah Desa

Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa Desa Sukonolo menjadi salah satu desa yang diberikan mandat langsung Pemerintah Kabupaten untuk mengembangkan website desa berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Desa/Kelurahan Digital (Dokumentasi Pemdes Sukonolo, 2023). Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1994) yang meliputi tiga tahapan yakni Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Proses menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan maksud membandingkan hasil wawancara dari informan, observasi lapangan, dan dokumen pendukung (Moleong, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan implementasi pengembangan website Pemerintah Desa Sukonolo belum berjalan optimal. Meskipun dalam hal ini telah terbangun website yang ada, namun belum memberikan informasi secara komprehensif kepada masyarakat. Disamping belum optimalnya website yang tersedia, terdapat bantuan dukungan oleh mahasiswa KKN FIA UB yang mendedikasikan untuk mengelola lebih lanjut website desa Sukonolo secara informal.

Gambar 3.

Paparan Sosial Media dan Website Desa oleh Mahasiswa KKN FIA UB



Sumber: Dokumentasi Pemdes Sukonolo, 2023

Selaras gambar diatas, adapun hasil temuan dalam penelitian ini mencakup korelasi hubungan kerangka teoritis implementasi kebijakan dari Edward III dengan eksisting pengembangan website Desa Sukonolo antara lain:

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan mengenai penggunaan website Desa Sukonolo dilakukan melalui proses rapat desa dan sosialisasi terbatas kepada perangkat desa. Namun, leveling informasi kepada masyarakat yang diberikan masih tergolong masih rendah. Sebagian besar warga desa Sukonolo belum mengetahui informasi website serta fungsi desa (Dokumentasi Pemdes Sukonolo, 2023).

Gambar 4.
Sosialisasi Website Desa Sukonolo



Sumber: Dokumentasi Pemdes Sukonolo, 2023

Lebih lanjut informan perangkat desa menyatakan dalam wawancara:

“sebenarnya website ini sudah ada sejak sebelum ada mahasiswa KKN, tapi ya ngonten mas belum semua warga kita ngertos. Sosialisasi yang kita lakukan sebatas di internal perangkat desa.” (Informan 1, Perangkat Desa, 2023)

Selaras dengan kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa komunikasi kebijakan yang terjadi belum menjangkau masyarakat secara umum. Hal ini diungkapkan dengan teori Edward III bahwa kejelasan dan konsisten komunikasi kebijakan itu sangat menentukan keberhasilan implementasi itu sendiri (Winarno, 2016). Tanpa adanya sosialisasi yang masif, maka masyarakat akan kesulitan memanfaatkan website sebagai sumber informasi yang dibutuhkan.

2. Sumber Daya

Peneliti memperoleh temuan berdasarkan hasil wawancara bahwa terdapat keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama implementasi website desa. Dimana hanya sebagian kecil

perangkat desa yang memiliki keterampilan teknis dalam mengelola website. Berikut penuturan salah satu dari pengelola website Desa Sukonolo mengatakan:

“Kami masih belajar mengelola website, kadang bingung cara memperbarui informasi. Tidak ada yang khusus ditugaskan untuk mengurus ini.” (Informan 2, Pengelola Website, 2023)

Sebagaimana selaras dengan teori Edward III ditekankan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan ialah terdapatnya dukungan sumber daya yang cukup memadai, dalam hal ini mengoperasikan sistem tata kelola website (Nugroho, 2009). Minimnya pelatihan dan kurangnya tenaga khusus IT dapat menjadi tantangan kedepan guna membuat konten website, update informasi yang dilakukan dapat menurunkan minat masyarakat untuk mengakses website layanan publik tersebut.

3. Disposisi Pelaksana

Komitmen dan sikap dari kebanyakan orang perangkat desa Sukonolo terhadap keterbukaan informasi publik terbilang cukup positif. Namun, hal tersebut belum dipadukan dengan kemampuan teknis yang memadai. Aparatur desa yang pada hakikatnya ingin meningkatkan transparansi kepada publik masih terbatas pada kapasitas untuk mempublikasikan didalam menu website pemerintah desa. Sehingga disposisi implementator yang baik menurut penelitian Supiyandi dkk (2023) harus didukung sumber daya serta unsur-unsur kelengkapan dalam sistem website desa. Berikut kutipan hasil wawancara kepada seorang perangkat desa Sukonolo:

“kami ingin berupaya untuk melakukan transparan kepada warga, terlebih soal anggaran dan kegiatan desa ini mas, tapi memang keterbatasan kami di IT yang ini menjadi hambatan hingga saat ini.” (Informan 1, Perangkat Desa, 2023)

Sebagaimana kutipan diatas, menunjukkan adanya di posisi positif, yaitu keinginan aparatur desa untuk transparan. Namun disposisi kebijakan tersebut tidak dipadukan dengan kapasitas teknis pengelola IT. Menurut Subarsono (2005), komitmen implementor penting untuk ditentukan selaras dengan berjalannya program kebijakan, namun bila tidak maka tidak cukup tercapai target dari kebijakan tersebut dapat terealisasikan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Desa Sukonolo masih belum mendukung pengelolaan website secara sistematis. Artinya bahwa belum ada pengelola yang secara paten mengurus website desa sebagai unsur keterbukaan informasi kepada publik. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan pengaturan terhadap tata kelola website desa yang terstruktur. Berikut hasil wawancara dari seorang tokoh masyarakat di luar pemerintah desa yang menuturkan:

“website itu seyogyanya bagus untuk memberikan info ke kami masyarakat. Tapi kalau tidak ada aturan yang jelas di dalam struktur organisasi desa itu sendiri. Saya sebagai masyarakat kurang yakin mas. Akhirnya karena tidak ada aturan yang jelas siapa yang urus, ya lama-lama dibiarkan saja.” (Informan 3 Tokoh masyarakat, 2023)

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas, dapat memperkuat argumentasi peneliti bahwa tanpa adanya SOP dan koordinasi yang terstruktur, pengelolaan website Pemerintah Desa Sukonolo tidak akan berkelanjutan dengan optimal. Selaras dengan Edward III, struktur birokrasi yang jelas dan adanya regulasi formal yang mengatur menjadi syarat mutlak untuk proses efektivitas implementasi kebijakan (Winarno, 2016).

Adapun untuk menjawab rumusan penelitian selanjutnya yakni peneliti menemukan beberapa faktor pendukung maupun penghambat. Faktor Pendukung implementasi website Desa Sukonolo antara lain:

1. Terdapat upaya berupa dukungan pembuatan website baru dari Program KKN FIA Universitas Brawijaya serta membantu proses pengembangan awal website.
2. Adanya komitmen Aparatur Desa, yang memiliki kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik guna meningkatkan transparansi secara umum.
3. Secara regulasi telah memberikan arah pedoman kepada pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi dasar hukum kewajiban desa untuk transparan (Retnowati, 2012).

Sedangkan untuk faktor penghambat meliputi:

1. Masih terdapat keterbatasan dari sisi SDM Teknis, karena minimnya perangkat desa yang terampil di bidang teknologi informasi khusus pengelolaan website.
2. Fasilitas Infrastruktur yang Terbatas, seperti akses internet yang tidak stabil dan ketersediaan perangkat komputer yang minim (Mulyadi, 2015).
3. Belum adanya SOP terkhusus dalam kaitannya dengan pengelolaan website desa Sukonolo. Hal ini menyebabkan pengelolaan masih bersifat sporadis dan cenderung tidak berkelanjutan.
4. Masih minimnya partisipasi masyarakat yang melek untuk memperoleh informasi melalui website, sehingga masih tergolong konvensional untuk datang langsung ke kantor desa guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Bahkan, sebagian besar warga belum terbiasa memanfaatkan website desa sebagai sumber informasi (Nesthy Kheren Nadia dkk., 2022).

Implementasi dari kebijakan pengembangan website desa Sukonolo sebagai instrumen informasi publik selaras dengan prinsip good governance, khusus aspek transparansi dan akuntabilitas (Mindarti, 2016). Namun, dalam implementasinya peneliti menemukan masih terhambat oleh adanya batasan dari sumber daya dan struktur birokrasi yang masih belum cukup optimal. Temuan tersebut memperkuat studi Patmasari dan Suharno (2019) bahwa

implementasi keterbukaan informasi publik di desa kerap kali masih terkendala pada aspek sosialisasi dan kelembagaan pengelola. Namun, novelty yang peneliti peroleh ialah studi ini memberikan gambaran lebih detail mengenai faktor implementasi melalui analisis model Edward III. Sehingga, penelitian ini bisa menegaskan bahwa penting diperlukan strategi penguatan kapasitas aparatur desa, penyediaan infrastruktur teknologi, serta penyusunan SOP pengelolaan website desa. Hal tersebut dapat dipastikan akan memberikan dampak keberlanjutan pada informasi website desa sebagai sarana transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Penutup

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi pengembangan website Desa Sukonolo sebagai instrumen keterbukaan informasi publik belum berjalan optimal. Analisis model Edward III menunjukkan:

1. Komunikasi terkait sosialisasi adanya website desa belum merata, sosialisasi lebih terbatas pada lingkup perangkat desa sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui dan memanfaatkan website.
2. Sumber daya manusia serta penggunaan fasilitas infrastruktur masih tergolong sangat terbatas, ditambah dengan masih minimnya keterampilan teknis aparatur desa serta ketersediaan infrastruktur teknologi yang kurang memadai.
3. Disposisi pelaksana tergolong positif, hal ini terlihat bahwa adanya komitmen perangkat desa untuk transparan, namun tidak diimbangi oleh kapasitas teknis dan dukungan kelembagaan.
4. Struktur birokrasi belum mendukung karena belum ada SOP yang mengikat secara aturan serta koordinasi yang sistematis untuk mengelola website desa.

Meskipun terdapat dukungan dari program KKN FIA Universitas Brawijaya dan regulasi nasional tentang keterbukaan informasi publik, faktor penghambat berupa keterbatasan SDM, infrastruktur, dan kelembagaan menyebabkan website desa belum berfungsi optimal sebagai sarana transparansi dan partisipasi masyarakat. Adapun saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi antara lain perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Desa guna diberikan pelatihan teknis pengelolaan website dan penugasan staf yang paten dalam mengelola konten informasi.

Referensi

- Dewi, K.N., Putri, R.N. and Santoso, H. (2021) 'Internal control system, utilization of accounting information technology, on village fund management accountability', *Journal of Accounting and Finance*, 15(2), pp. 123–135.
- Febriananingsih, N. (2012) 'Website desa sebagai sarana keterbukaan informasi publik', *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 10(1), pp. 87–96.

- Hakim, L. (2016) 'Globalisasi dan implikasinya terhadap masyarakat Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), pp. 101–115.
- Husni, A., Nugroho, D. and Setiawan, R. (2023) 'The role of village government performance and transparency in influencing village public trust', *International Journal of Governance and Public Policy*, 8(1), pp. 45–59.
- Islamy, I. (2014) *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadir, A. (2003) *Pengenalan sistem informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994) *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. 2nd edn. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mindarti, L.I. (2016) *Paradigma administrasi publik dan governance*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Moleong, L.J. (2017) *Metodologi penelitian kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015) *Perilaku organisasi dan kepemimpinan pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Nesthy, K.N., Putra, D.A. and Sari, A.W. (2022) 'Implementasi keterbukaan informasi publik: Studi pada website PPID Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko', *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Administrasi*, 14(1), pp. 55–66.
- Nugroho, R. (2009) *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ombudsman Republik Indonesia (2022) *Laporan tahunan Ombudsman RI 2022*. Jakarta: Ombudsman RI.
- Patmasari, E. and Suharno (2019) 'Implementasi keterbukaan informasi publik pada pemerintah desa di Kabupaten Sleman', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), pp. 112–124.
- Rahimi, S., Fitri, H. and Zulfahmi (2017) 'Pengembangan sistem informasi desa untuk menuju tata kelola desa yang baik (good governance) berbasis TIK', *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), pp. 77–89.
- Retnowati, N. (2012) 'Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik', *Jurnal Administrasi Negara*, 5(2), pp. 45–56.
- Rohman, M. (2020) 'Teknologi informasi dan pelayanan publik', *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), pp. 155–170.
- Setiawan, A., Sugiana, D. and Mahameru Aji, A. (2013) 'Keterbukaan informasi publik dalam perspektif demokrasi', *Jurnal Komunikasi Politik*, 5(1), pp. 23–37.

- Subarsono, A.G. (2005) *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2018) *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2015) *Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Supiyandi, A., Yuliana, R. and Putra, M. (2023) 'Penerapan spiral method dalam pengembangan sistem informasi desa sebagai keterbukaan informasi publik', *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 17(2), pp. 89–102.
- Winarno, B. (2016) *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.